

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2013–2017 adalah:

**”JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI,
MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI,
MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN
DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA
PELAYANAN PUBLIK”**

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
2. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
3. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
4. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2013-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
- c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
- d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
- e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Aparatur yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bahwa untuk misi kesatu, pada kalimat "Jakarta kota modern yang tertata rapi", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan :

- 1. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa serta meminimalisir kawasan industri yang tidak bersifat industri teknologi tinggi (hi-tech);
- 2. Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, bandara, pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Transit Oriented Development (TOD), pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase, pengembangan sistem air minum beserta sumber air bakunya,

pengelolaan air limbah, pemanfaatan air tanah, permukiman dan energi;

3. Lingkup sistem distribusi logistik meliputi pengembangan Terminal Agro, terminal beras dan bahan pokok lainnya.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar (smart city) yang memperhatikan tiga hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan kota Jakarta sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, differensiasi dan branding atas produk-produk yang dimiliki kota Jakarta. Selain itu pembangunan kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten.

Sementara untuk kalimat "konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan penataan ruang yang merupakan penguatan Pilar Aparatur yang difokuskan pada bersih dan transparannya aparat dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan ruang serta enforcement terhadap pelanggaran peraturan tata ruang dan bangunan mengingat pengembangan wilayah

kota yang harus mengacu pada rencana pola dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas.

Pengendalian pemanfaatan ruang kota terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan ruang kota yang tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya perwujudan kota Jakarta sebagai kota yang kompak (compact city) akan terus didorong melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang terpadu dan pengembangan kawasan-kawasan transit oriented development di sepanjang jalur transportasi massal.

Misi Kedua: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain

Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Lingkungan Hidup yang berarti akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat dan infrastruktur pengelolaan sampah dan air.

Meskipun kota Jakarta telah berkembang pesat sebagai pusat perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Berbagai masalah menahun yang masih sering terjadi antara lain banjir, kemacetan, permukiman kumuh, dan sampah. Kegagalan mengatasi masalah diatas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota.

Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi secara tepat oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jakarta karena hal ini dapat mengakibatkan dampak besar dan merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi di Kota Jakarta selain

disebabkan karena faktor alam juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di sungai dan selokan dan membangun hunian di bantaran sungai. Selain itu pemeliharaan saluran drainase juga dirasakan masih kurang optimal sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran air di sungai dan saluran.

Kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta semakin lama semakin parah. Hal ini disebabkan kapasitas jalan yang tidak mencukupi, keterbatasan ketersediaan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi, serta ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tidak dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai sehingga kelancaran lalu lintas menurun. Titik-titik kemacetan baru, muncul di hampir seluruh wilayah Jakarta setiap tahunnya. Disisi lain, pengembangan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal dirasakan masih sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Kemacetan yang terjadi di Jakarta telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian kota.

Kota Jakarta juga masih dihadapkan pada masalah permukiman kumuh dan kualitas lingkungan permukiman kota yang semakin menurun. Penanganan permukiman kumuh merupakan masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi saat ini menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan tertata. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak saja menjadi tugas dari pemerintah daerah, tapi juga merupakan tugas dari seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan Sampah saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara terpadu dan berkelanjutan. Selama ini pengelolaan sampah masih difokuskan pada pengelolaan

konfensional, sehingga kedepan perlu diupayakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan canggih, agar sampah yang ada dapat pula dimanfaatkan untuk didaur ulang, digunakan kembali serta sebagai alternatif untuk menghasilkan sumber energi.

Kebutuhan sumber air baku yang masih tergantung dari Waduk Jatiluhur dan dari Tangerang dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan mencari sumber-sumber air baku yang terbarukan.

Pemerintah Kota Jakarta telah berkomitmen untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang selalu terjadi dan merugikan masyarakat melalui pembangunan kota yang berketahanan, antara lain dengan membangun tanggul raksasa dalam konsep Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS), dukungan anggaran tahunan yang signifikan, serta menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya.

Misi Ketiga: Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota

Bahwa untuk misi ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya dan peningkatan ruang publik berupa taman, taman interaktif dan hutan kota.

Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota. Ketersediaan hunian dan lingkungan permukiman yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Masalah utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat di Jakarta adalah keterbatasan lahan, sehingga penyediaannya belum

dapat sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, kemauan masyarakat untuk tinggal di rumah susun juga masih rendah.

Pembangunan kota Jakarta kedepan harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian dan ruang publik yang terjangkau bagi warga kotanya. Pemerintah Kota harus mengembangkan skema-skema penyediaan rumah yang layak dan terjangkau baik dengan dukungan program dan kegiatan daerah maupun kerjasama dengan pemerintah pusat dan perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta penyediaan ruang publik yang memadai.

Misi Keempat: Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota

Bahwa untuk misi keempat, pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya kota Jakarta seperti penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, revitalisasi kota tua dan kawasan budaya, serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Karakter budaya betawi juga terus diperkuat melalui penerapan dalam arsitektur bangunan dan karakter kota, pengembangan pusat-pusat dan kawasan budaya betawi.

Kota Jakarta selain mempunyai fungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan politik, sosial dan budaya. Dengan fungsinya yang beragam, kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari

pekerjaan dan tinggal di Jakarta, sehingga penambahan penduduk kota Jakarta akibat migrasi terus meningkat.

Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu.

Heterogenitas masyarakat Jakarta selain dapat menjadi potensi pembangunan, dapat pula dipandang sebagai pemicu terjadinya konflik yang bersifat primordial atau antar kelompok dan golongan. Sebagian dari mereka sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang dapat berkembang menjadi perkelahian massal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing wilayah

yang di dukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi Kelima: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Bahwa untuk misi kelima, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan Provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen) secara online, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang

terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara online melalui sistem informasi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1. STRATEGI

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota, termasuk didalamnya pusat kegiatan primer dan sekunder serta Kawasan TOD
- Strategi ini merupakan perwujudan dari strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Strategi operasionalnya meliputi: i) Peningkatan dan

pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, ii) Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis, dan iii) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal.

- b) Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan

Strategi ini merupakan komitmen untuk mewujudkan Jakarta Baru yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat termasuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi informal sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: i) Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan, ii) Pembangunan mall khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), iii) Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL, dan iv) Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.

- c) Peningkatan ketahanan pangan kota

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan kota sebagai kebutuhan pokok yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat kota. Strategi operasional meliputi: i) Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar dan ii) Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif.

- d) Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, kelistrikan dan energi yang memadai. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum, ii) Peningkatan pasokan suplai listrik dan iii)

Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien.

e) Optimalisasi penataan ruang

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penataan ruang mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Strategi operasional meliputi: i) Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, iii) Pengembangan sistem informasi spasial, iv) Peningkatan penataan lingkungan hidup.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal

Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang sudah semakin parah dengan memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan angkutan umum dan pengembangan sistem angkutan umum massal untuk melayani pergerakan orang dan barang. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung, ii) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, iii) Penataan Pelayanan Angkutan Umum, iv) Restrukturisasi Pelayanan Angkutan Umum, v) Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, vi) Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas dan vii) Penataan sistem parkir.

b) Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan pelayanan sarana dan prasarana jalan yang mantap dalam menunjang aktivitas

perkotaan. Strategi operasionalnya meliputi: i) Pengembangan simpang tak sebidang dan ii) Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan.

- c) Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu
Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan perkotaan dari ancaman bahaya banjir, genangan dan banjir rob yang semakin parah sehingga dapat melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem tata air yang terpadu, ii) Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase, iii) Pemeliharaan sarana prasarana drainase, iv) Konservasi sumberdaya air, dan v) Pengendalian banjir akibat air laut pasang.

- d) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat, ii) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat, iii) Pengembangan sistem air minum perpipaan, iv) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan v) Penerapan Konsep 3R.

- e) Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara

Strategi ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan perkotaan akibat tingginya pencemaran terhadap air, tanah dan udara kota Jakarta. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran tanah dan iii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara.

- f) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan

ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim
Strategi ini adalah integrasi antara upaya pengurangan resiko bencana serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, ii) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, iii) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana, iv) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan v) Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya melalui skema penyediaan rusunawa dan rusunami serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa, ii) Pengembangan rumah susun sewa, iii) Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi, iv) Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, v) Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota dan vi) Pemberian keamanan bermukim (*security of tenure*).

- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat RTRW sebesar 30 persen. Strategi operasionalnya dilakukan

melalui: i) Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat, ii) Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik dan iii) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Keempat** dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama
Strategi dilakukan dalam rangka menjamin kerukunan kehidupan antar umat beragama, mencegah terjadinya konflik budaya dan agama serta terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Pencegahan dini potensi konflik, ii) Pengembangan forum dialogis antar komponen masyarakat, iii) Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) dan iv) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketertiban umum.
- b) Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan
Strategi ini menekankan pentingnya memperhatikan dan mengembangkan budaya dalam pembangunan kota sehingga nilai-nilai budaya lokal dapat tercermin dan mewarnai kehidupan masyarakat. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya, ii) Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional, iii) Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kotamadya dan Kepulauan Seribu, iv) Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, v) Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi, vi) Penyelenggaraan event-event kebudayaan, dan vii) Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian.
- c) Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai wadah pembinaan mental sekaligus wahana

penyaluran minat dan kemampuan pemuda. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah, ii) Pembinaan olahraga secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dan iii) Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kelima** dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Penataan kelembagaan, organisasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

Strategi ini dimaksudkan untuk terus menata kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif, ii) Pengembangan tata laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel, iii) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, iv) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan, dan v) Pengembangan sistem *reward and punishment* dalam pengembangan sumberdaya manusia.

- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan ii) Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang *real-time*.

- c) Peningkatan pelayanan publik

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini.

Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas), ii) Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan, iii) Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, dan iv) Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

d) Peningkatan pelayanan pendidikan

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi DKI Jakarta. Strategi operasionalnya meliputi: i) Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR, ii) Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan iii) Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja.

e) Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat serta adanya perlindungan sosial untuk mewujudkan kehidupan kota yang berkeadilan. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta menuju Jakarta SEHAT, ii) Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, iii) Pemberian pelayanan KB gratis dan iv) Peningkatan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari

waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir rob, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Jakarta memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumberdaya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Disisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan kota. Upaya penanganan banjir, genangan dan banjir rob serta pembenahan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal

akan dilaksanakan secara menerus dan menjadi prioritas dalam periode pembangunan lima tahun kedepan (2013-2017).

b) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah demi terwujudnya percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

c) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan

dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya harus menunjukkan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah menahun. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh warga kota terlihat dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat dalam kehidupan kota Jakarta.

Pembangunan tahun ketiga juga harus terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan daerah.

d) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah menahun (banjir, kemacetan, prasarana kota), penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih banyak.

e) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan tahapan tahun pelaksanaan RPJMD sebagaimana diatas dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi

Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota	√	√	√	√	√
2. Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan	√	√	√		
3. Peningkatan ketahanan pangan kota	√	√	√	√	√
4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota	√	√	√		
5. Optimalisasi penataan ruang	√	√	√	√	√
6. Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal	√	√	√	√	√
7. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan	√	√	√	√	√
8. Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu	√	√	√	√	√
9. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas	√	√	√		
10. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara	√	√	√		
11. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim	√	√	√	√	√
12. Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota	√	√	√	√	√
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau	√	√	√	√	√
14. Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama	√	√	√		

15. Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan	√	√	√	√	√
16. Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	√	√	√		
17. Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan	√	√	√		
18. Pembinaan kehidupan politik dan demokrasi	√	√			
19. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	√	√	√		
20. Peningkatan pelayanan publik	√	√	√	√	√
21. Peningkatan pelayanan pendidikan	√	√	√	√	√
22. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat	√	√	√	√	√

Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta

MISI 1 : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW	1 Peningkatan dan pementapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, dan Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder, yang berwawasan lingkungan antara lain melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus Marunda
		2 Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perdagangan : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Pengembangan Kawasan Tanah Abang, Pengembangan kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Pengembangan kawasan Manggarai, Pengembangan kawasan Jatinegara, Pengembangan kawasan Bandar Kemayoran, Pengembangan kawasan Dukuh Atas, Pengembangan kawasan Mangga Dua, Pengembangan kawasan Sentra Primer Barat, Pengembangan kawasan Sentra Primer

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Timur, Pengembangan kawasan Pulau Tidung
			2 Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan dan Urusan Lingkungan Hidup : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai melalui Persiapan pembangunan <i>Jakarta Coastal Development Strategy</i> (JCDS) / <i>National Capital Integrated Coastal Development</i> (NCICD)
2	Berkembangnya kawasan-kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah	1 Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : mengembangkan kawasan terpadu (superblok) multifungsi dan multi strata masyarakat melalui pembangunan TOD di sepanjang koridor MRT
			2 Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong kawasan peremajaan kota yang vertikal, kompak dan terkait jaringan transportasi massal
3	Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota	1 Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan	1 Urusan Penataan Ruang dan Urusan Koperasi dan UKM : Mengefektifkan aturan penyediaan ruang bagi ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan serta memberikan pinjaman modal bergulir
		2 Pembangunan mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL)	1 Urusan Koperasi dan UKM : Membangun mall khusus bagi pedagang kaki lima pada lokasi tanah milik pemerintah
		3 Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL	1 Urusan Perdagangan : Memperbaiki pasar-pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima
4	Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal	1 Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal	1 Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : membantu pembentukan asosiasi/kelembagaan pedagang informal
			2 Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : mengadakan pelatihan untuk manajemen usaha kecil
5	Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk	1 Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan stok komoditas dan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	mendukung aktivitas ekonomi kota	menghadapi ketatnya persaingan pasar	kebutuhan pokok
		2 Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan distribusi dan stok pangan di tingkat kelurahan
6	Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang public	1 Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum	1 Urusan Penataan Ruang, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengintegrasikan jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan serta Penataan dan pengelolaan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)
7	Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota	1 Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien	1 Urusan Penataan Ruang dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral : Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
			2 Urusan Energi dan Sumberdaya mineral : Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)
		2 Penataan jaringan utilitas perkotaan	1 Urusan Pekerjaan umum : Penataan dan pembangunan jaringan <i>ducting</i> utilitas
8	Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan	1 Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang	1 Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui Pelaksanaan forum komunikasi publik terkait penataan ruang secara rutin dan terjadwal serta melibatkan masyarakat luas, Pemberian Akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui Rencana Penataan Ruang pada media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2 Urusan Penataan Ruang : Meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk penyusunan masterplan penanganan permasalahan tata ruang.
9	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	1 Urusan Penataan Ruang : Mengendalikan pembangunan sesuai dengan aturan tata bangunan dan lingkungan yang telah ditentukan melalui Pelaksanaan pemberian saran teknis terhadap rencana pembangunan gedung dan bangunan lainnya, dan Pelaksanaan Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai ketentuan
			2 Urusan Penataan Ruang : Melakukan kajian dan peninjauan kembali terkait mekanisme dan tata cara perijinan pemanfaatan ruang
			3 Urusan Penataan Ruang : menerapkan pendekatan <i>zoning regulation</i> pada kawasan-kawasan cepat berkembang
			4 Urusan Penataan Ruang : Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
		2 Pengembangan sistem informasi spasial	1 Urusan Penataan Ruang : menerapkan sistem informasi spasial berbasis web
MISI 2 : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain			
1	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	1 Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi	1 Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan terminal antara lain melalui Revitalisasi Terminal Bus Dalam Kota
		2 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal	2 Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan pelabuhan melalui Pengembangan angkutan penyeberangan kepulauan seribu
			1 Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Rel melalui Pembangunan MRT koridor Utara-Selatan tahap I (Lb Bulus - Bunderan HI), Pembangunan sebagian MRT koridor Selatan-Utara tahap II (Bunderan HI - Kampung Bandan), dan Persiapan pembangunan MRT koridor Barat-Timur

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2 Urusan Perhubungan : Mengembangkan <i>Light Rapid Transit</i> (LRT) melalui Pembangunan Koridor <i>Green Line</i> dan <i>Blue Line</i> , sesuai RTRW
			3 Urusan Perhubungan : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal Laut dan sungai melalui Pembangunan dermaga penyeberangan dari dan ke kepulauan seribu, Pengadaan armada kapal penyeberangan, Standarisasi keamanan dan keselamatan kapal penyebrangan tradisional, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal laut dan sungai
			4 Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan angkutan massal Berbasis Jalan atau BRT(Bus Rapid Transit) melalui pembangunan Koridor Busway baru yaitu Koridor 13 (Ciledug-Blok M), Koridor 14 (UI-Manggarai), dan Koridor 15 (Pondok Kelapa – Blok M), Pembangunan Busway koridor Integrasi Jabodetabek; Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, dan Jakarta-Depok/Bogor, Pengembangan layanan <i>Feeder</i> Busway, Penambahan armada Bus Busway dan Bus <i>Feeder</i> Busway serta Peningkatan profesionalisme lembaga pengelola Busway
			5 Urusan Perhubungan : Meningkatkan kelembagaan pengelolaan Busway
			6 Urusan Perhubungan : Melakukan Restrukturisasi Trayek Angkutan Umum
		3 Penataan Angkutan Umum Reguler	1 Urusan Perhubungan : Melakukan peremajaan bus angkutan umum reguler melalui pengadaan bus baru untuk menggantikan bus lama / bus yang tidak layak jalan
			2 Urusan Perhubungan : Mendorong percepatan transformasi bentuk kepengusahaan angkutan umum dari perorangan menjadi Bahan Usaha
		4 Pengendalian dan Keselamatan Transportasi	1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan ITS (<i>Intelligent Transport System</i>) melalui Pengembangan ITS di koridor ekonomi strategis serta mengkaji opsi-opsi pengendalian arus kendaraan pribadi, angkutan kota dan truk di dalam kota
			2 Urusan Perhubungan : Melakukan kajian menyeluruh penyebab kemacetan untuk membenahan titik-titik rawan kemacetan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Urusan Perhubungan : Menerapkan manajemen / pembatasan lalu lintas antara lain melalui Penerapan <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP), teknik-teknik <i>traffic restraint</i> lainnya, dan Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi
			4 Urusan Perhubungan : Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye sadar tertib lalu lintas
		5 Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas	1 Urusan Perhubungan : Membangun fasilitas / sarana pejalan kaki dan jalur sepeda terutama pada koridor angkutan umum, jalan utama dan kawasan pemukiman
		6 Penataan sistem parkir	1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan sistem parkir yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai melalui Pengembangan sistem parkir <i>online</i>
			2 Urusan Perhubungan : Menerapkan sewa parkir tinggi dan progressive
			3 Urusan Perhubungan : Menata parkir <i>off street</i> dan <i>on street</i>
			4 Urusan Perhubungan : Mengembangkan fasilitas <i>park and ride</i> di stasiun dan terminal
			5 Urusan Perhubungan : Mengembangkan taman dan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan
2	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota	1 Pengembangan simpang tak sebidang	1 Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan Pembangunan <i>flyover</i> dan <i>underpass</i>
		2 Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan	1 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan melalui Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta memperlebar lahan badan jalan di titik <i>bottleneck</i>
			2 Urusan Pekerjaan Umum : Pengembangan Jalan Arteri antara lain melalui Pembangunan jalan <i>missing link</i> , dan Pengembangan jalur khusus untuk angkutan massal pada jaringan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			jalan arteri layang
			3 Urusan Pekerjaan Umum : Menunjang pengembangan ruas jalan tol dalam kota
3	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	1 Pengembangan sistem tata air yang terpadu	1 Urusan Pekerjaan Umum : Menyelesaikan Kanal Banjir Timur melalui Pembebasan Lahan dan pembangunan jalan inspeksi KBT 2 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan Lahan untuk mendukung program Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS) 3 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan lahan untuk mendukung Penataan Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain 4 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan lahan dan penyiapan LARAP untuk mendukung Penataan kapasitas Kali Ciliwung 5 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas Cakung Drain, Kali Sunter dan Kanal Banjir Timur di kawasan aliran timur serta penataan Kali Cideng 6 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Membangun sarana dan prasarana sumberdaya air serta melakukan persiapan pembangunan <i>Giant Sea Wall</i> dalam konteks <i>Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) / National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i>
		2 Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase	1 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui Normalisasi dan penataan sempadan sungai dan saluran 2 Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembuatan sodetan sepanjang sungai ciliwung sampai kanal barat / timur 3 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas situ, waduk dan embung melalui Pembebasan, pembangunan dan pemeliharaan situ, waduk dan embung 4 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase kota antara lain melalui Peningkatan drainase terutama di pusat kota dan Pengadaan alat berat serta alat angkut. 5 Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembangunan terowongan bawah tanah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			multifungsi (<i>deep tunnel</i>) melalui investasi dari pihak swasta murni
			6 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem polder
		3 Pemeliharaan sarana prasarana drainase	1 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pengerukan sungai dan saluran termasuk pengerukan Bendungan Katulampa
			2 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pengerukan situ, waduk dan embung
			3 Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase
			4 Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembersihan sungai dan saluran
		4 Konservasi sumberdaya air	1 Urusan Pekerjaan Umum : Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui Pembangunan waduk tangkapan air di hulu
			2 Urusan Pekerjaan Umum : Meminimalkan <i>run-off</i> air hujan melalui Pembangunan sumur resapan dan lubang biopori
		5 Pengendalian banjir akibat air laut pasang	1 Urusan Pekerjaan Umum : Mengoptimalkan upaya adaptasi terhadap air laut pasang melalui Pembangunan tanggul pengaman pantai dan penahan air laut pasang
4	Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal	1 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat	1 Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaian dan IPAL sistem terpusat
		2 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat	1 Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman antara lain melalui Pembangunan IPAL Komunal, Sosialisasi penggunaan <i>septic tank</i> standar lingkungan hidup, dan Pembangunan/Peningkatan IPAL sistem setempat
5	Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota	1 Pengembangan sistem air minum perpipaan	1 Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan di seluruh DKI Jakarta melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian ke Jakarta, Pengembangan sumber air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan, Pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih perpipaan yang dapat langsung diminum di kawasan tertentu dan pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang
6	Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan	1 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Urusan Pekerjaan Umum : Menyediakan prasarana sarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan antara lain melalui Penyediaan lahan untuk fasilitas

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman		persampahan dan Peningkatan TPS sesuai standar lingkungan Hidup, peningkatan pembersihan sampah di kali/sungai dengan pemasangan sistem saringan sampah otomatis pada batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain dan pada setiap batas wilayah kota administrasi serta peremajaan truk angkutan sampah 2 Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pelayanan persampahan melalui swastanisasi kebersihan, dan kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan ITF dan TPST 3 Urusan Pekerjaan Umum : Memperluas tanggung jawab stakeholder antara lain melalui Penggalangan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pengelolaan persampahan
		2 Penerapan Konsep 3R	1 Urusan pekerjaan Umum : Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/hulu melalui Pembangunan sentra 3R / Pusat Daur Ulang, Pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, dan Pengembangan jejaring kerja bank sampah
7	Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta	1 Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara	1 Urusan Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran udara melalui Pemantauan Kualitas Udara, Pembinaan stakeholder melalui program PROPER dan SUPER, Penegakan hukum terhadap pencemaran udara, Peningkatan penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kawasan Dilarang Merokok dan Uji Emisi 2 Urusan Lingkungan Hidup : Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca antara lain melalui Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Industri, Transportasi, dan Pemantauan dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
		2 Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air	1 Urusan Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran air antara lain melalui Pemantauan Kualitas Air, Pembinaan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air, dan Penegakan hukum terhadap pencemaran air serta membentuk dan memperkuat komunitas pencinta sungai
		4 Menurunkan beban pencemaran tanah	1 Urusan Lingkungan Hidup : Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya.

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
8	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1 Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana	1 Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan sistem peringatan dini bencana
			2 Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana
			3 Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan kerjasama dengan swasta untuk penyediaan gudang <i>buffer stock</i>
			4 Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan pelatihan dan <i>evacuation drill</i>
		2 Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana	1 Urusan Otonomi Daerah: Pembangunan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
2 Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan Pembangunan instalasi <i>hydrant</i> di kawasan permukiman padat/rawan kebakaran			
MISI 3 : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.			
1	Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	1 Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa	1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan superblok rumah susun sewa murah yang dilengkapi pasar, sarana kesehatan dan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat
		2 Pengembangan rumah susun sewa	1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan rumah susun sewa pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik Pemda atau konsolidasi lahan dan bangunan
			2 Melaksanakan pendampingan masyarakat calon penghuni rumah susun
		3 Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi	1 Urusan Perumahan Rakyat : Mengendalikan pembangunan rusunami dan apartemen bersubsidi antara lain melalui Penyelesaian pembangunan rumah susun dan mempercepat proses penghunian rumah susun serta sosialisasi penyuluhan dan bimtek tentang cara dan etika tinggal dihunian vertikal
	2 Urusan Perumahan Rakyat : Melakukan Study dan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak serta memfasilitasi pembentukan dan penguatan asosiasi penghuni apartemen		
		4 Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta	1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Perbaikan rumah susun sewa yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung)	1 Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota	1 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai
			2 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik
			3 Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW- RW Kumuh
3	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta	1 Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	1 Urusan Lingkungan Hidup : Menambah RTH Publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik
			2 Urusan Lingkungan Hidup : Pengembangan RTH privat antara lain melalui Penerapan regulasi untuk penambahan RTH Privat, penyediaan lahan minimal untuk hutan kota dan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan konservasi flora dan fauna
		2 Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik	1 Urusan Lingkungan Hidup : Membangun dan mengembangkan taman, taman interaktif dan hutan kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana rekreasi budaya betawi, sarana penyaluran kreativitas atau <i>creative public space</i> serta berfungsi sebagai daerah resapan air
MISI 4 : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.			
1	Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas	1 Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya	1 Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan budaya betawi dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi alkulturasi budaya nusantara dan budaya betawi
2	Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta	1 Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional	1 Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event budaya nasional dan daerah antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara
		2 Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kotamadya dan Kepulauan Seribu	1 Urusan Kebudayaan : Melaksanakan pembangunan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah dan kepulauan Seribu dan peningkatan pemanfaatan balai kesenian daerah di lima wilayah
			2 Urusan Kebudayaan : Mengembangkan kawasan strategis budaya provinsi di Kota Tua, Taman Ismail Marzuki, Jatinegara dan Situ Babakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3 Urusan kebudayaan : Meningkatkan interaksi dan komunikasi budayawan dan seniman, dan antara budayawan dan seniman dengan masyarakat
3	Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota	1 Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta	1 Urusan Kebudayaan : Menata fisik lingkungan kawasan Kota Tua Jakarta melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
			2 Urusan Kebudayaan : Melakukan kerjasama dengan pemilik bangunan/gedung dan memberdayakan masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan kota tua sebagai destinasi wisata dan benda cagar budaya
		2 Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi	1 Urusan Perumahan : Menata gedung-gedung pemerintahan yang bernuansa budaya betawi
			2 Urusan Perumahan : Membangun Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat
			3 Urusan Perumahan Rakyat : Menerapkan aturan bangunan/gedung bernuansa budaya betawi
4	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota	1 Penyelenggaraan event-event kebudayaan	1 Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan karnaval dan festival budaya di lima wilayah
			2 Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event-event budaya betawi secara reguler
		2 Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian	1 Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan aktivitas dan eksistensi sanggar budaya
			2 Urusan Kebudayaan : Memfungsikan Balai rakyat di kecamatan sebagai pusat kegiatan sosial-budaya komunitas kecamatan
5	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan	1 Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal	1 Urusan Ketenagakerjaan : Memberikan jaminan sosial khususnya bagi pekerja informal melalui Penerapan asuransi kesejahteraan sosial bagi pekerja informal dengan sistem <i>cost sharing</i>
6	Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat	1 Pengembangan sarana dan prasarana OR di seluruh wilayah	1 Urusan Olahraga dan Pemuda : Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui Penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Remaja sebagai sarana untuk aktualisasi aktivitas seni-budaya pelajar, remaja dan mahasiswa dan Penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7	Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan	1 Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja	1 Urusan Ketenagakerjaan : Meningkatkan kurikulum pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			2 Urusan Ketenaga Kerjaan : Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
8	Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)	1 Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)	1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan harmonisasi masyarakat dalam kemajemukan antara lain melalui pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)
9	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	1 Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota	1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berperilaku budaya yang tertib, disiplin, ramah, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara ketentraman kota.
			2 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota
			3 Urusan Otonomi Daerah: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan
MISI 5 : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.			
1	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	1 Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	1 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan penguatan kelembagaan Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)
			2 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan Pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan
			3 Urusan Otonomi Daerah : Menata kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
		2 Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel	1 Urusan Otonomi Daerah : Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
		3 Pengelolaan keuangan yang transparan dan	1 Urusan Otonomi Daerah : mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		akuntabel	melalui pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan 2 Urusan Otonomi Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah melalui Penerapan <i>online</i> sistem pajak daerah 3 Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD antara lain melalui Pengelolaan BUMD dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, dan penerapan <i>Reward and Punishment</i> terhadap Manajemen BUMD serta divestasi atau likuidasi terhadap perusahaan daerah yang belum membaik kesehatannya.
			4 Urusan Penanaman Modal : Meningkatkan Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip <i>good governance</i>
			5 Urusan Perindustrian : Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan dan peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri kreatif dan kompetitif
2	Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya	1 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan 2 Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan sumber daya manusia 3 Proses pengisian jabatan secara terbuka	1 Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan 1 Urusan Otonomi Daerah : menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan sesuai dengan karakteristik organisasi 1 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan Lelang Jabatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	1 Peningkatan kepedulian masyarakat pada pem-bangunan politik dan demokrasi	1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan politis dan demokrasi
		2 Peningkatan kapasitas dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi	1 Urusan Otonomi Daerah : melakukan pembinaan terhadap partai politik
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan	1 Urusan Otonomi Daerah : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan antara lain melalui proses musrenbang dan Pelaksanaan rembug warga.
			2 Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
		2 Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	1 Urusan Otonomi Daerah : penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
			2 Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	1 Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas)	1 Urusan Otonomi Daerah : Menyelenggarakan pelayanan prima di Kelurahan dan Kecamatan
		2 Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan	2 Urusan Otonomi Daerah : Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan publik
6	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang	1 Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik	1 Urusan Penanaman Modal : Membangun jaringan komunikasi perjinan investasi secara online

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	yang lebih baik	2 Urusan Otonomi Daerah : Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3 Urusan Otonomi Daerah : Menerapkan sistem informasi pelayanan publik
7	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	1 Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR 2 Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1 Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) bagi peserta didik di sekolah negeri dan Swasta serta pemberian biaya personal Siswa Miskin (BPSM) dengan KARTU JAKARTA PINTAR 2 Urusan Pendidikan : Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Anak di Sekolah 3 Urusan Pendidikan : Memberikan bantuan/hibah untuk pembangunan gedung sekolah swasta ataupun hibah <i>meubelair</i> 4 Urusan Pendidikan : Meningkatkan daya tampung peserta didik 5 Urusan Pendidikan : Meningkatkan sekolah yang berfungsi dengan baik 1 Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik melalui Penyebaran sekolah-sekolah unggulan ke seluruh wilayah, dan melalui Penyempurnaan sistem rayonisasi dan peningkatan karakter bagi kualitas didik 2 Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Guru
8	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1 Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta	1 Urusan Kesehatan : Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi masyarakat melalui Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin dan rentan Jakarta dengan KARTU JAKARTA SEHAT 2 Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional dan rumah susun 3 Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap 4 Urusan Kesehatan : Menambah kapasitas tempat tidur Kelas Tiga pada RSUD 5 Urusan Kesehatan : Membentuk dan mengembangkan Kelurahan siaga aktif

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
9	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi	6 Urusan Kesehatan : menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di kelurahan
			7 Urusan Kesehatan : Meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)
			1 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : Meningkatkan Pelayanan KB Gratis 2 Urusan Kependudukan : Membuat kajian pola mobilitas dan migrasi penduduk kedalam dan keluar Jakarta 3 Urusan Sosial : Melakukan studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis, dan tuna wisma)

C. Prioritas Daerah

Dengan demikian kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2017 diprioritaskan untuk:

1. Pengembangan sistem transportasi;
2. Antisipasi banjir, rob, dan genangan
3. Peningkatan kualitas Lingkungan perumahan dan pemukiman kota;
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;
6. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja;
7. Pembangunan budaya multi-kultur;
8. Peningkatan pelayanan publik;
9. Peningkatan kualitas pendidikan
10. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Prioritas Pembangunan Menurut Urusan

Prioritas pembangunan menurut urusan terdiri atas 34 urusan pemerintahan, yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, sebagai berikut:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan dan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup
- 9) Pertanahan

- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
- 13) Sosial
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 16) Penanaman Modal
- 17) Kebudayaan
- 18) Pemuda dan Olahraga
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21) Ketahanan Pangan
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan Informatika
- 26) Perpustakaan
- 27) Kelautan dan Perikanan
- 28) Pertanian
- 29) Kehutanan
- 30) Energi dan Sumber Daya Mineral
- 31) Pariwisata
- 32) Perindustrian
- 33) Perdagangan
- 34) Ketransmigrasian